

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Konflik di Kawasan Timur-Tengah begitu tiada habisnya. Salah satu konflik di Timur Tengah yang telah menarik perhatian internasional adalah pertikaian antara Israel dan Palestina. Konflik ini telah melalui berbagai usaha diplomasi untuk mencapai solusi. Dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan di wilayah tersebut, pentingnya pengaturan dan kerja sama tidak bisa diabaikan. Jika pengaturan kerja sama tidak didasari oleh dasar politik yang kuat, risiko eskalasi konflik di kawasan tersebut menjadi lebih tinggi.

Kawasan Timur-Tengah juga menyimpan konflik laten antar negara ataupun konflik internal di dalam negara sendiri. Tanpa adanya Organisasi Internasional dan integritas Kawasan nampaknya akan sulit mengkoordinir dalam memadamkan konflik-konflik yang kerap muncul di antara negara-negara Timur-Tengah. Sengketa perebutan wilayah akan mejadi suatu ancaman yang dikhawatirkan berdampak mengganggu tatanan keamanan Timur-Tengar. Seiring dengan dicetuskannya ide mengenai integrasi regional di Kawasan Timur-Tengah, terdapat keinginan negara-negara yang berada di Kawasan tersebut untuk menciptakan stabilitas lingkungan yang damai dan aman secara domestik demi memperlancar proses integrasi regional untuk membuat suatu manajemen konflik dan menciptakan resolusi mengenai sengketa teritorial (Yenigün, n.d.).

Sengketa wilayah tersebut demikian tergambar pada benang kusut hubungan politik antar negara di Kawasan Timur-Tengah dalam persoalan konflik Palestina-Israel. Konflik Palestina-Israel kini telah menjadi salah satu wilayah penting di Timur-Tengah. Upaya resolusi konflik Palestina dengan Israel melalui angkatan bersenjata masih dianggap sebagai langkah yang paling efektif dalam memperebutkan kekuasaan. Namun tindakan ini tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan yang menimbulkan banyak korban jiwa.

Konflik antara Israel dan Palestina bermula dari persaingan atas penguasaan wilayah. Pada masa sebelumnya, wilayah Palestina dikuasai oleh Kekaisaran Utsmaniyah selama periode dominasi mereka di Timur Tengah (M. A. Muchsin, 2015). Ketika Perang Dunia I pecah, Gaza menjadi bagian dari wilayah Palestina yang dikuasai oleh Inggris. Di tengah-tengah konflik ini, komunitas Yahudi dan Arab, yang didasarkan pada identitas etnis dan nasionalisme, bersaing untuk menguasai wilayah tersebut. Sebagai respons terhadap konflik ini, PBB menciptakan dua wilayah terpisah, satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab, meskipun komunitas Arab menentanginya, dan konflik bersenjata semakin memanas.

Setelah Israel memproklamkan kemerdekaannya pada tahun 1948, negara-negara Arab seperti Mesir dan Irak mendorong pembentukan struktur politik di wilayah Palestina. Sementara itu, kelompok Fatah di Palestina mulai melancarkan perlawanan bersenjata terhadap Israel. Pada tahun 1964, Organisasi Pembebasan Palestina (Palestine Liberation Organization) yang didominasi oleh kelompok Fatah didirikan oleh Liga Arab (Cohen et al., 2018). PLO terus mendorong

penghancuran Israel melalui tindakan kekerasan yang dilakukan oleh gerakan Angkatan Bersenjata yang beroperasi secara rahasia. Ketegangan antara Israel dan Palestina pun kemudian mencapai puncaknya, hal ini ditandai oleh kejadian Perang Enam Hari pada tahun 1967.

Selama perang tersebut, intensitas tindakan kekerasan meningkat, terutama ketika Israel mengambil kendali atas Gaza dan Tepi Barat dengan pemerintahan militer dan membatasi hak-hak politik Palestina sebagai upaya untuk mengatasi ancaman keamanan yang berasal dari PLO. Ketegangan ini akhirnya memicu perlawanan rakyat Palestina yang dikenal sebagai intifada pertama. Di tengah situasi yang kacau, kelompok militan Islam sekuler kiri yang dikenal sebagai Hamas muncul sebagai alternatif terhadap Fatah dan PLO yang kehilangan pengaruh secara bertahap. Penggunaan tindakan bersenjata terus meningkat, dan ini menyebabkan pecahnya intifada kedua. Pada tahun 2005, Israel secara sepihak menarik diri dari Gaza dan Tepi Barat setelah mendudukinya selama 40 tahun. Namun, Israel tetap mempertahankan pembatasan akses ke Jalur Gaza melalui darat, laut, dan udara. (Jewish Institute for National Security of America, 2015).

Pada tahun 2007, HAMAS secara *de facto* mengambil kendali di Jalur Gaza dengan mengalahkan FATAH dalam pemilihan umum Palestina, yang memperburuk eskalasi konflik antara Israel dan HAMAS. Hal ini terutama dipicu oleh sikap HAMAS yang menentang eksistensi Israel di Palestina. Perbedaan dalam identitas dan tujuan HAMAS, yang didasarkan pada ideologi Islam dan cenderung bersifat isolasionis, memperumit hubungannya dengan Israel. Meskipun Israel

memberlakukan blokade terhadap Gaza, HAMAS berhasil membangun jaringan terowongan yang menghubungkan Gaza ke Sinai, Mesir, untuk mengamankan pasokan logistik, senjata, perlengkapan militer, dan anggota HAMAS. Dengan mengendalikan infrastruktur ini, HAMAS memperkuat posisinya dan melancarkan serangan terhadap Israel sebagai salah satu upaya untuk menggabungkan Gaza di bawah kepemimpinan mereka dan untuk mendorong Israel agar mengakhiri blokade Gaza (Sari, 2018).

Sebaliknya, Israel merespons langkah ini dengan serangan militer dan tindakan teror yang lebih intensif terhadap warga sipil. Israel melancarkan tiga operasi militer sejak HAMAS berkuasa di Jalur Gaza. Operasi militer pertama terjadi pada tanggal 27 Desember 2008 dan diberi nama "*Operation Cast Lead*." Tujuan utama dari operasi militer ini adalah menghentikan serangan roket yang diluncurkan oleh kelompok yang terkait dengan HAMAS dan faksi-faksi Palestina lainnya (Al, 2009). Operasi militer kedua adalah "*Operation Pillar of Defense*," yang terjadi pada tanggal 14 November 2012. Tujuan dari operasi ini adalah untuk menghancurkan infrastruktur HAMAS dan organisasi teroris lainnya di Jalur Gaza, seperti yang dijelaskan oleh Eiland (2012). "*Operation Protective Edge*" adalah operasi militer ketiga dan merupakan yang terbesar, berlangsung selama 51 hari sejak tanggal 8 Juli 2014. Dalam operasi militer ini, Israel mengambil pendekatan yang lebih agresif dalam melakukan serangan, yang mengakibatkan banyak korban sipil.

Sebagai respon negara di Kawasan Timur-Tengah dalam menganggapi krisis yang sedang dihadapi Palestina, Liga Arab yang terdiri dari negara Mesir, Irak, Yordania, Lebanon, Arab Saudi, Suriah, Yaman, Libya, Sudan, Maroko, Tunisia, Kuwait, Aljazair, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Oman, Mauritania, Somalia, Palestina, Djibouti, dan Komoro. Mengalami perubahan sikap terhadap palestina semenjak adanya perpecahan dalam memperebutkan pengaruh, yakni, pasca munculnya HAMAS dan FATAH. Ditambah kekalahan Liga Arab dalam perang enam hari. Kemudian, pada sejak awal 2011 negara-negara Liga Arab ini menghadapi persoalan-persoalan dalam negeri yang diperlihatkan dengan adanya turbulensi politik yang menyebabkan rezim-rezim otoriter arab, jatuh kekuasaannya.

Masyarakat Arab merujuk pada peristiwa politik penting ini sebagai "*al-Tsaurat al-Arabiyyah*," yang merupakan sebuah revolusi yang bertujuan mengubah tatanan masyarakat dan negara menuju kondisi yang lebih ideal. Revolusi ini terjadi setelah mereka dipimpin oleh rezim otoriter yang memiliki kekuasaan tanpa batas, yang membatasi kebebasan masyarakat dan menciptakan ketidaksetaraan antara elit (penguasa) yang hidup mewah dan rakyat yang miskin. Di dunia Barat, peristiwa ini dikenal sebagai *Arab Springs* (Musim Semi Arab atau al-Rabi' al-Arabiyy), yang mencerminkan awal dari perkembangan demokrasi di negara-negara Arab (Sahide et al., 2015).

Musim Semi Arab ini ditandai oleh runtuhnya rezim-rezim otoriter di berbagai negara Arab. Peristiwa ini dimulai di Tunisia dengan kejatuhan Zein Al-

Abidin Ben Ali, kemudian meluas ke Mesir dengan penggulingan Hosni Mubarak. Selanjutnya, Libya berhasil mengakhiri pemerintahan Moammar Khadafy yang telah berlangsung selama hampir 40 tahun, sementara konflik masih berlanjut di Yaman, Bahrain, dan Suriah hingga saat ini (Sahide et al., 2015). Situasi ini semakin memperkompleks masalah di Timur Tengah, terutama karena negara-negara tersebut juga menghadapi tantangan internal. Persaingan kepentingan sejak awal Arab Spring telah berdampak besar pada dinamika politik di negara-negara Teluk, khususnya dalam konteks dukungan terhadap Palestina. Terlihat bahwa anggota Liga Arab memiliki kecenderungan untuk lebih memprioritaskan kepentingan domestik mereka (Nurhadi, 2021).

Dalam keadaan demikian posisi Palestina semakin melemah. Kemudian dengan melihat Sebagian negara-negara Arab terus melakukan upaya normalisasi diplomatis dengan Israel. Disisi lain hubungan antara Turki dengan Israel terkadang memanas namun selalu Kembali dengan melakukan normalisasi. Keretakan antara Turki dengan Israel ada korelasinya dengan konflik Palestina-Israel. Misalnya pada tahun 2002 saat perdana Menteri Turki saat itu Bulent Ecevit menggambarkan peristiwa di Jenin dalam peristiwa Operasi Pertahanan Perisai disebut sebagai “Genosida” yang berdampak retak terhadap hubungan diplomatis mereka (Lindenstrauss, 2018). Turki menanggapi *Operation Protective Edge* ini memperdalam krisis dalam hubungan antara Israel dan Turki, sebagaimana dibuktikan dalam beberapa cara. Selama kampanye, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyampaikan hal serupa, membuat pernyataan yang sangat kuat tentang

Israel, di antaranya, bahwa Israel telah melakukan “genosida sistematis” terhadap Palestina.

Koordinasi intensif dalam kebijakan antarnegara membuat regionalisasi dan pendirian lembaga keamanan kawasan menjadi semakin penting. Kerja sama regional juga memiliki peran yang signifikan dalam menyelesaikan konflik dan perselisihan antara negara-negara di wilayah tersebut. (Tang, 2009). Mengingat ketegangan antara Turki dan Mesir turut mewarnai konflik antara Palestina dan Israel. Langkah dan tindakan yang dilakukan oleh HAMAS terhadap Israel di mediasi oleh ke dua negara yakni Turki dan Mesir. Mesir mengusulkan untuk segera mengakhiri pertempuran dengan Israel namun, dianggap sebagai tantangan terhadap inisiatif yang diusulkan oleh Qatar dan Turki. Kemudian Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry dan Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman menuduh Qatar dan Turki telah menyabotase pengaruhnya terhadap HAMAS (Lindenstrauss, 2018).

Negara-negara tersebut menjadi determinasi terhadap sikap dan langkah yang dilakukan HAMAS. Konflik bersenjata antara Israel dan Hamas dapat dianggap sebagai konflik asimetris. Menurut glosarium keamanan nasional yang dikeluarkan oleh Akademi Pertahanan Nasional, konflik asimetris didefinisikan sebagai berikut:

“Actions of two opposing parties (entities) of a varying scope and combat capabilities or traditional methods (ways) of operating, resulting in a situation where a party in an unfavourable position must use its particular strengths or take advantage of specific weaknesses of an opposing party” (POKRZYWIŃSKI, 2015).

Definisi tersebut mengindikasikan bahwa dalam konflik tersebut, pihak yang terlibat bukan lagi antara negara dengan negara, melainkan melibatkan aktor non-negara. Aktor non-negara ini bisa mencakup kelompok teroris, pemberontak, gerakan fundamentalis Islam, dan entitas lain yang tidak terkait langsung dengan pemerintahan negara. Dengan demikian, pendekatan dalam menangani konflik bersenjata dengan aktor semacam itu menjadi sangat berbeda. Mereka sering memanfaatkan pengetahuan mereka tentang wilayah, budaya setempat, komitmen ideologis, dan dukungan dari masyarakat lokal untuk melegitimasi tindakan militer mereka..

Dalam kasus konflik antara Israel dan Hamas, status Hamas masih menjadi subjek perdebatan. Amerika Serikat telah mengklasifikasikan Hamas sebagai sebuah perkumpulan atau kelompok teroris (Departemen Luar Negeri AS), sementara bagi negara-negara Arab, Hamas dianggap sebagai sebuah kelompok perlawanan (Jack & Haaretz, 2017). Hamas disebut merupakan sebuah bentuk "*hybrid adversary*," yaitu sebuah bentuk organisasi non-negara dengan kemampuan dan perlengkapan canggih dan juga memiliki keterlibatan dengan militer konvensional.

Salah satu faktor yang menguatkan posisi Israel dalam membela Operation Protective Edge sebagai operasi militer yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika perang adalah dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat sebagai sekutu mereka. Dukungan ini terlihat ketika Amerika Serikat mendukung Israel dalam menolak ICC untuk melakukan penyelidikan dan peradilan atas konflik di

Palestina. Selain itu, Amerika Serikat juga memberikan tekanan kepada jaksa ICC (James Marc Leas, 2015). Pentingnya dukungan ini dapat dipahami dengan melihat kedekatan hubungan antara Amerika Serikat dan Israel, serta pernyataan resmi Penasihat Keamanan Amerika Serikat yang mengakui konflik Israel-Palestina sebagai salah satu kepentingan nasional mereka. Amerika Serikat secara aktif berupaya memfasilitasi solusi dua negara, yaitu Israel dan Palestina, yang dapat hidup berdampingan dalam damai dan demokratis..

Pengaruh ini berdampak pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait konflik Israel-Palestina. Amerika Serikat memiliki serangkaian agenda yang mencakup pelestarian keamanan nasional, kemakmuran ekonomi, penyebaran nilai-nilai demokrasi, dan mempertahankan peran kepemimpinan di panggung dunia. Terlibatnya Amerika Serikat dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina dapat membawa manfaat yang signifikan. Ini termasuk peningkatan keamanan nasional Amerika Serikat, stabilitas di tingkat regional dan global, perbaikan hubungan dengan negara-negara di Timur Tengah, akses yang stabil terhadap pasokan minyak, penyebaran nilai-nilai demokrasi liberal, dan memperkuat posisi kepemimpinan Amerika Serikat dalam sistem internasional (Chomsky, 2001).

Latar belakang kepentingan nasional yang telah diuraikan juga memotivasi Amerika Serikat untuk memberikan dukungan kepada Israel selama Perang Gaza 2014 melawan Hamas. Namun, bukan hanya Amerika Serikat yang memberikan dukungan, Israel juga mendapat dukungan dari negara-negara Arab moderat,

termasuk Mesir dan Arab Saudi. Namun, peran Amerika Serikat menjadi lebih mencolok karena statusnya sebagai negara besar yang memiliki potensi untuk memengaruhi jalannya operasi militer Israel. Dalam pandangan Amerika Serikat, konflik yang berkepanjangan ini dimulai oleh Hamas, yang menolak berbagai upaya internasional untuk mengakhiri pertikaian tersebut. Selain itu, Amerika Serikat juga mengkritik Hamas karena sengaja menempatkan warga sipil yang tidak bersalah dalam bahaya dengan menggunakan mereka sebagai perisai manusia.

Pada tanggal 8 Juli 2014, Juru Bicara Gedung Putih, Josh Earnest, mengutuk keras peluncuran roket oleh organisasi teroris di Gaza dan tindakan mereka yang sengaja mengancam warga sipil. Earnest menegaskan bahwa tidak ada negara yang dapat menerima serangan roket yang ditujukan kepada warga sipil. Oleh karena itu, Amerika Serikat mendukung hak Israel dalam melakukan pertahanan diri dan membalas serangan tersebut. (Ricky Ben-David, 2014).

Sama dengan Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan Uni Eropa juga mengecam serangan roket yang dilakukan oleh Hamas terhadap warga Israel (Asseburg et al., 2010). Dalam perspektif Israel, dukungan dari negara-negara tersebut memberikan keuntungan dalam menghadapi tekanan internasional yang mereka alami. Namun, perlu diingat bahwa sebagian besar negara yang mendukung Israel adalah negara-negara besar yang memiliki pengaruh di PBB. Amerika Serikat sendiri memiliki konflik yang kuat dengan kelompok "hybrid adversary" seperti Hamas dan kelompok teroris lainnya. Ini dipengaruhi oleh peristiwa tragis 9/11 yang mendorong Amerika Serikat untuk mengambil kebijakan "War on Terror".

Belajar dari pengalaman mereka dalam menghadapi kelompok non-negara di Afghanistan, Amerika Serikat juga memiliki tantangan dalam mengurangi korban sipil yang bisa menjadi target. Di Afghanistan, kelompok pemberontak bahkan menggunakan warga sipil sebagai perisai untuk melindungi diri mereka sendiri (Cordesman, 2015).

Di sisi lain, negara-negara dalam Liga Arab juga mengutuk tindakan Israel. Sekretaris Liga Arab, Nabil al Arabi, mengeluarkan seruan dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah-langkah guna menghentikan agresi Israel di Jalur Gaza. Iran menekankan pentingnya negara-negara Barat dan pendukung Israel untuk mengambil sikap tegas dalam mencegah bencana kemanusiaan di Palestina. Venezuela juga mengecam respons militer yang dianggap tidak adil dan tidak proporsional oleh Israel terhadap warga Palestina, yang disampaikan oleh Presiden Nicolas Maduro. Selain itu, Mesir, melalui Kementerian Luar Negeri mereka, mengutuk tindakan permusuhan yang telah mengakibatkan pembunuhan pada warga Palestina (AL Jazeera, 2014).

Negara-negara yang mengeluarkan kecaman terhadap Israel sebagian besar bukan merupakan negara-negara besar. Oleh karena itu, dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dapat digunakan oleh Israel sebagai alasan atau justifikasi untuk pelaksanaan Operation Protective Edge agar tidak dianggap sebagai pelanggaran Hukum Internasional. Amerika Serikat sendiri mengklasifikasikan Hamas sebagai kelompok teroris, dan tindakan teroris dianggap tidak sah dalam Hukum Internasional. PBB telah mengeluarkan resolusi yang menekankan

penolakan terhadap terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, terlepas dari motifnya, dan melarang penggunaan teror untuk alasan apa pun. Resolusi ini dipengaruhi secara signifikan oleh Amerika Serikat, terutama setelah peristiwa 9/11. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1269 (1999), misalnya, dengan tegas mengutuk semua tindakan, metode, dan praktik terorisme sebagai kejahatan dan tidak dapat dibenarkan, terlepas dari motivasinya, dalam segala bentuk dan manifestasinya, di mana pun dan oleh siapa pun yang melakukannya, terutama jika tindakan tersebut dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. (UN Security Council Resolutions 1269, 1999).

Posisi Israel dan Palestina terpetakan ke dalam sebuah posisi kekuatan politik yang cukup rumit. Sehingga menggambarkan benang kusut pengaruh global dan regional dalam pertikaian tersebut perlu dianalisis secara komprehensif. Dengan ini penulis merasa penting untuk mengangkat persoalan, bagaimana menganalisa konflik Palestina dengan Israel ke dalam sebuah penelitian yang berjudul **Regional Security Complex dalam Konflik Palestina-Israel**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya faktor regional security complex dalam konflik pertikaian Israel-Palestina di Kawasan Timur-Tengah.
2. Adanya Amity dan Enmity menambah kompleksitas konflik Israel-Palestina

3. Transformasi geopolitik Timur-Tengah dalam konflik Palestina-Israel dan keterlibatan negara-negara timur tengah menambah kompleksitas konflik Israel- Palestina

1.3. Pembatasan Masalah

Mengingat kompleksnya pembahasan yang akan diteliti, maka kiranya penulis perlu untuk membatasi permasalahan yang ada, penulis membatasi penelitian ini dimaksudkan dapat menjabarkan secara sistematis Kompleksitas keamanan regional pada konflik Palestina dengan Israel. Dalam pelaksanaan hubungan internasional untuk membedah benang kusut kontelasi konflik akibat keterlibatan kekuatan global dan regional dalam merespon konflik Palestina dengan Israel.

Palestina dan Israel secara geografis terletak di Kawasan Timur-Tengah dimana Kawasan tersebut dalam panggung Internasional dikenal sebagai inang peperangan. Dalam hal ini pengaruh Amerika Serikat sebagai negara *greet power* kerap terlibat dalam konflik global. AS yang merupakan sekutu Israel juga merespon pertikaian yang sedang dialami oleh Palestina dan Israel juga tidak meninggalkan Uni Eropa sebagai sekutunya. Kemudian memetakan keberpihakan secara politik negara-negara Timur-Tengah terhadap ketegangan Palestina-Israel tersebut. Konflik ber-kepanjangan antara Palestina dengan Israel telah hampir berjalan tujuh dekade. Maka dari itu, peneltian ini akan dibatasi dalam peristiwa-peristiwa tahun 2015 sampai 2019.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dengan ini penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1.4.1 Bagaimana perspektif *regional security complex theory* dalam melihat konflik Palestina-Israel?
- 1.4.2 Apa saja Amity dan Enmity dalam *regional security complex* pada konflik Palestina-Israel?
- 1.4.3 Apa pengaruh Isu, Transformasi geopolitik dan konflik lain di timur tengah pada konflik Palestina-Israel?

1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana perspektif *regional security complex theory* dalam melihat konflik Palestina-Israel
2. Untuk mengetahui Amity dan Enmity dalam *regional security complex* pada konflik Palestina-Israel.
3. Untuk mengetahui pengaruh Isu, Transformasi geopolitik dan konflik lain di timur tengah pada konflik Palestina-Israel.

1.5.2. Kegunaan Penelitian

Secara umum, penelitian dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu penelitian dasar (basic research) dan penelitian terapan (applied research). Penelitian dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan

dengan alasan intelektual dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Penelitian ini dilakukan dengan motivasi untuk menambah pemahaman kita tentang fenomena alam atau dunia, tanpa adanya kegunaan praktis langsung sebagai tujuan utama. Contoh penelitian dasar meliputi studi tentang ruang angkasa, penelitian tentang bulan, dan penelitian ilmiah murni lainnya yang tidak memiliki tujuan praktis langsung. Sementara itu, penelitian terapan adalah jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan sesuatu dengan lebih baik, efektif, dan efisien. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam suatu konteks tertentu. Contoh penelitian terapan melibatkan pengembangan teknologi baru, peningkatan kinerja produk atau proses, atau penyelesaian masalah praktis dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, teknologi, ekonomi, dan lain sebagainya. (Jamal, 2012).

Secara spesifik, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu sumber atau referensi yang berguna bagi mahasiswa, serta masyarakat umum. Penelitian ini merupakan hasil dari pengetahuan dan disiplin ilmu yang telah diperoleh penulis selama masa studi di Universitas Pasundan (UNPAS). Beberapa manfaat dari penelitian ini meliputi::

1. Kegunaan Teoritis.

Memberikan informasi kepada pembaca mengenai kompleksitas keamanan regional dalam konflik perebutan kekuasaan antara Palestina-Israel.

2. Kegunaan Praktis.

Menambah referensi dan informasi serta studi empiris bagi para akademisi ilmu Hubungan Internasional yang menaruh minat pada kajian konflik Palestina-Israel.